

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU

Nini Astriyani

niny_to@yahoo.com

Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The purpose of this research is to know and analyzed: 1). The influence of government internal controlling system to prevent fraud in Government of Palu City. 2). The influence of controlling environment to prevent fraud in government of Palu city. 3) The influence of risk assessment to prevent fraud in government of Palu city. 4) The influence of controlling activity to prevent fraud in government of Palu city. 5) the influence of information and communication to prevent fraud in government of Palu City. 6) The influence of monitoring to prevent fraud in government of Palu city, the statistical test used multiple regression analysis with SPSS 16.0 program shows that: 1) The government internal controlling system with the same effect and significant impact in prevention fraud in government of Palu City. 2) Controlling environment has no significant effect on the prevention of fraud in government of Palu city. 3). Risk assessment has significant effect on prevention fraud in government of Palu city. 4). Controlling activity has no significant impact in prevent fraud in government of Palu city. 5) Information and communication has no significant effect on prevent fraud in government of Palu city. 6) monitoring has significant effect to prevent fraud in government of Palu city.

Keywords: *Government internal controlling system, Fraud prevention*

Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sejauh ini berbagai perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai perundang-undangan dan produk hukum tersebut dirasakan sudah tidak mampu lagi mengakomodasi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Pengelolaan pemerintahan yang baik tentunya akan memberikan acuan ataupun gambaran bagaimana bisa terkelola secara transparan, adanya kemandirian, akuntabel, adanya pertanggungjawaban dan kewajaran sehingga kinerja keuangan dapat dicapai sesuai dengan visi dan misi pemerintah yang telah ditentukan sebelumnya, namun demikian harapan diatas belum sepenuhnya dapat dirasakan. Hal ini disebabkan karena belum

memadainya instrumen organisasi untuk menciptakan pengelolaan yang baik dan belum terbangunnya komitmen yang tinggi dari para pengelola anggaran. Akibatnya muncul berbagai penyimpangan, penyelewengan, penyeludupan dan korupsi. Fenomena fraud menjadi sesuatu yang lumrah di instansi pemerintah.

Permasalahan Fraud dapat terjadi dimana saja. Bahkan pada organisasi yang telah memiliki sistem pengendalian yang baik sekalipun. Tidak dapat dijamin bahwa suatu organisasi di maksud dapat terbebas dari kemungkinan Fraud. Fraud dapat membawa akibat kerugian financial, rusaknya reputasi, permasalahan hukum, hingga bangkrutnya perusahaan.

Melihat kenyataan tersebut, seharusnya menyadarkan semua pihak khususnya pengelola keuangan di setiap SKPD untuk membangun komitmen terhadap penerapan tata kelola keuangan yang baik secara konsisten dan

meluas pada semua lapisan, karena tanpa adanya kesadaran dan komitmen akan mengakibatkan tidak tercapainya kinerja keuangan yang baik di instansi pemerintah, untuk itu diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam menanggulangi Fraud.

Pada tanggal 28 Agustus 2008 telah dimulai babak baru pembaruan pengelolaan organisasi di instansi pemerintah dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengisyaratkan perlunya SPIP yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Pengendalian intern adalah representasi dari keseluruhan kegiatan di dalam organisasi yang harus dilaksanakan, dimana proses yang dijalankan oleh dewan komisaris ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan pengendalian operasional yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO, 1992 dalam Hiro Tugiman, 2004).

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas Pengendalian internal yang baik sangat penting, Jika pengendalian internal suatu organisasi lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud sangat besar, Sebaliknya jika pengendalian internal kuat, maka

kemungkinan terjadinya kesalahan dan fraud dapat diperkecil. Apabila kesalahan dan fraud masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan sedini mungkin, yaitu dengan dibangun dan diimplementasikannya pengendalian internal, diharapkan akan menimbulkan daya tangkal terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh para pelayanan publik.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palu yang menjadi objek pemeriksaan dari Inspektorat Kota Palu dan termuat dalam Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palu sebanyak 87 SKPD.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus, yaitu seluruh populasi penelitian menjadi sampel. Maka, yang menjadi responden penelitian yaitu pimpinan pada setiap SKPD selaku pejabat pengguna anggaran di Pemerintah Daerah Kota Palu.

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

SPIP Berdasarkan PP 60 Tahun 2008:

- a. Lingkungan pengendalian (X1)
Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal.
- b. Penilaian risiko (X2)
Kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola risiko

yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.

c. Aktivitas pengendalian (X3)

Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara tepat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan observasi untuk mendapatkan data-data pendukung dalam penelitian ini. Selanjutnya agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka data-data penelitian yang diperoleh melalui kuesioner sebelum digunakan terlebih dahulu diuji keakuratan dan keandalannya sebagai alat ukur. Melalui dua bentuk pengujian untuk menguji kualitas data yang diperoleh dari penerapan instrumen, maka diperlukan uji validitas dan uji reliabilitas.

Menurut Sugiyono(2007) Teknik analisa data yang digunakan meliputi :

1. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari : Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas dan Uji Heteroskedastisitas.
2. Analisis Regresi Linier Berganda
Alat analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

Dimana:

Y = Pencegahan Fraud

a = Konstanta, yaitu nilai Y jika nilai seluruh variabel lain adalah nol

β_1 = Koefisien regresi dari X_1

β_2 = Koefisien regresi dari X_2

β_3 = Koefisien regresi dari X_3

β_4 = Koefisien regresi dari X_4

β_5 = Koefisien regresi dari X_5

X_1 = Lingkungan Pengendalian

X_2 = Penilaian resiko

X_3 = Kegiatan pengendalian

X_4 = Informasi dan komunikasi

X_5 = Pemantauan

3. Pengujian Hipotesis

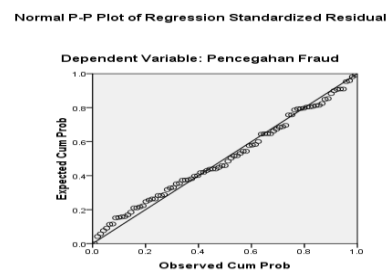
Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan terdiri dari pengujian secara simultan (Uji F), pengujian secara parsial (Uji t) dan analisis koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dengan bantuan program statistik SPSS 16 hasil Uji Normalitas data dapat dilihat pada titik sebaran data yang dihasilkan dalam penelitian ini sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini adalah data normal, seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Normalitas Data

b. Uji Multikolinearitas

c.

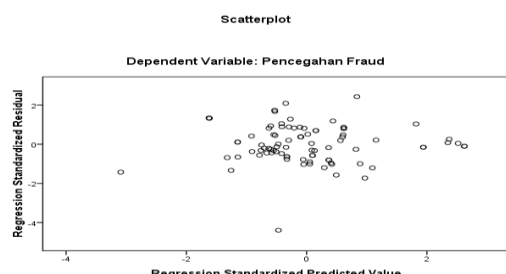
Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	Collinearity statistic		Ket.
		Tolerance	VIF	
1	Lingkungan Pengendalian (X1)	0.368	2.718	Bebas
2	Penilaian Resiko (X2)	0.190	5.250	Bebas
3	Kegiatan Pengendalian (X3)	0.169	5.910	Bebas
4	Informasi dan Komunikasi (X4)	0.223	4.493	Bebas
5	Pemantauan (X5)	0.306	3.271	Bebas

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai VIF dari variabel-variabel independen dalam model regresi yang digunakan kurang dari angka 10

sedangkan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak terdapat gejala multikolinearitas.

d. Uji Heterokedastisitas



Gambar 2. Hasil uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 4.2. terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini memberi makna bahwa persamaan regresi memenuhi asumsi *heteroskedastisitas*.

2. Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.10
Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi
Berganda

Variabel Dependen (Y) = Pencegahan <i>Fraud</i>			
Variabel	Koefisien Regresi	t	sig.
Constanta	9,723	1,826	0,071
Lingkungan Pengendalian (X1)	0,183	1,848	0,068
Penilaian Resiko (X2)	0,430	2,025	0,046
Kegiatan Pengendalian (X3)	0,030	0,307	0,760
Informasi dan Komunikasi (X4)	-0,022	-0,079	0,938
Pemantauan (X5)	0,928	3,553	0,001
R	= 0,825		
R square (R2)	= 0,681		
Ajusted R Square	= 0,661		
F Hitung	= 34,563		
Sig F	= 0,000		

Sumber : Lampiran Hasil Regresi

Model regresi yang diperoleh dari tabel diatas adalah:

$$Y = 9,723 + 0,183X_1 + 0,430X_2 + 0,030X_3 - 0,022 X_4 + 0,928X_5$$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut di atas menunjukkan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar 9,723. Hal ini mengindikasikan bahwa Pencegahan *Fraud* (Y) mempunyai nilai sebesar 9,723 sebelum adanya variabel-variabel bebas (Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, pemantauan).
2. Variabel Lingkungan Pengendalian dengan koefisien regresi 0,183 menunjukkan pengaruh positif antara lingkungan pengendalian dengan pencegahan *Fraud*. Artinya semakin baik lingkungan pengendalian maka akan semakin kuat pencegahan *Fraud*.
3. Variabel Penilaian Resiko dengan koefisien regresi 0,430 menunjukkan pengaruh positif antara Penilaian Risiko dengan pencegahan *Fraud*. Artinya semakin baik Penilaian Risiko maka akan semakin kuat pencegahan *Fraud*.
4. Variabel Kegiatan Pengendalian dengan koefisien regresi 0,30 menunjukkan pengaruh positif antara kegiatan pengendalian dengan pencegahan *Fraud*. Artinya semakin baik kegiatan pengendalian maka akan semakin kuat pencegahan *Fraud*.
5. Variabel Informasi dan komunikasi dengan koefisien regresi -0,022 menunjukkan pengaruh negatif antara informasi dan komunikasi dengan pencegahan *Fraud*. Artinya semakin baik informasi dan komunikasi maka akan semakin lemah pencegahan *Fraud*.
6. Variabel Pemantauan dengan koefisien regresi 0,928 menunjukkan pengaruh positif antara pemantauan dengan pencegahan *Fraud*. Artinya semakin baik pemantauan maka akan semakin kuat pencegahan *Fraud*.

Pengujian Hipotesis Pertama

Uji simultan adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen (X) yang diteliti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y) berarti semua variabel bebasnya, yakni Lingkungan Pengendalian (X_1), Penilaian Resiko (X_2), Kegiatan Pengendalian (X_3), Informasi dan komunikasi (X_4), Pemantauan (X_5) dengan variabel tidak bebasnya Pencegahan *Fraud* (Y).

Berdasarkan uji determinasi (kehandalan model) memperlihatkan nilai Adjusted R Square = 0,661. Hal ini berarti bahwa sebesar 66,1% variabel tidak bebas dipengaruhi oleh kelima variabel bebas, selebihnya 33,9 % variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Adjusted R square adalah R square yang telah disesuaikan nilai ini selalu lebih kecil dari R square dari angka ini bisa memiliki harga negatif, bahwa untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R^2 sebagai koefisien determinasi.

Selanjutnya berdasarkan tabel 4.19 dari hasil perhitungan diperoleh $F_{hitung} = 34,563$ pada taraf nyata $\alpha = 0,05$ atau $P < 0,05$. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi Probabilitas = 0,000. Sehingga dapat dinyatakan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebasnya. Dengan demikian maka hipotesis yang menyatakan bahwa: “Secara simultan Lingkungan Pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* di Pemerintah Kota Palu” berdasarkan hasil Uji-F ternyata *diterima*.

Pengujian Hipotesis Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Ke enam

Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk melihat pengaruh masing-masing

variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya, sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (X_1)

Variabel Inventarisasi Aset menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,183 dan tingkat signifikansi sebesar 0,068 sedangkan untuk nilai $P > 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Lingkungan Pengendalian mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ”secara parsial Lingkungan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* di Pemerintah Kota Palu” ternyata *ditolak*.

2. Penilaian resiko (X_2)

Variabel Penilaian Resiko menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,430 dan tingkat signifikansi sebesar 0,046 sedangkan untuk nilai $P < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Penilaian Resiko mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *Fraud*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa ”secara parsial Penilaian Resiko berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* di Pemerintah Kota Palu” ternyata *diterima*.

3. Kegiatan Pengendalian (X_3)

Variabel Kegiatan Pengendalian menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,30 dan tingkat signifikansi sebesar 0,760 sedangkan untuk nilai $P > 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Kegiatan Pengendalian mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa ”secara parsial Kegiatan Pengendalian berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* di Pemerintah Kota Palu” ternyata *ditolak*.

4. Informasi dan komunikasi (X_4)

Variabel Pemantauan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,022 dan tingkat

signifikansi sebesar 0,938 sedangkan untuk nilai $P > 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Informasi dan komunikasi mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap pencegahan *Fraud*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa "secara parsial Informasi dan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* di Pemerintah Kota Palu" ternyata *ditolak*.

5. Pemantauan (X_5)

Variabel Pemantauan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,928 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 sedangkan untuk nilai $P < 0,05$ pada taraf kepercayaan 95%. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Pengawasan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pencegahan *Fraud*. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis keenam yang menyatakan bahwa "secara parsial Pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* di Pemerintah Kota Palu" ternyata *diterima*.

Penerapan Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan terhadap Pencegahan *Fraud* Pada Pemerintah Daerah Kota Palu

Didalam peraturan pemerintah dalam negeri No.13 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, apabila pelaksanaan system pengendalian intern instansi itu berjalan dengan baik dan berkualitas maka keandalan laporan keuangan dapat terlindungi sehingga dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan Sementara itu dalam peraturan pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008, pengertian sistem pengendalian intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan

secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengendalian intern terhadap kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Palu sangatlah penting dilakukan, agar terhindar dari kecurangan (*Fraud*) dan penyelewengan serta dapat mempersempit ruang gerak oknum-oknum aparat pemerintah yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok mereka. Akan tetapi pemerintah Kota Palu belum sepenuhnya menjalankan sistem pengendalian intern dengan maksimal karena dari hasil penelitian hanya ada dua variabel yang berpengaruh dan tiga variabel tidak berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*. Hal ini terjadinya karena sistem pengendalian intern belum sepenuhnya diterapkan di pemerintah Kota Palu karena masih kurangnya sosialisasi di SKPD pemerintah Kota Palu sehingga sebagian besar pegawai belum memahami fungsi dari sistem pengendalian intern dan hal ini juga dipengaruhi oleh sumber daya aparatur yang masih terbatas di pemerintah Kota Palu.

Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan komunikasi, Pemantauan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Palu

Hasil analisis regresi secara simultan menunjukkan bahwa nilai Lingkungan pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan pemantauan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Palu. Selanjutnya dari hasil analisis dapat diartikan bahwa setiap peningkatan Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan akan memberikan

peningkatan terhadap pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Palu.

Hal ini sesuai dengan Penelitian Lia Meliany, Erna Hernawati (2013) yang menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Pimpinan instansi pemerintah harus memastikan bahwa fungsi - fungsi pengendalian intern telah berjalan seperti yang diharapkan. Untuk itu, pimpinan instansi pemerintah perlu melakukan semua aspek atau unsur-unsur yang termuat dalam sistem pengendalian internal pemerintah yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan. Sehingga secara simultan Pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*.

Pengaruh Lingkungan Pengendalian terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Palu

Berdasarkan fakta hasil penelitian dilapangan diatas bahwa masih banyak dari setiap indikator variabel lingkungan pengendalian yang masih rendah untuk dilaksanakan setiap SKPD sehingga hal ini berpengaruh pada lingkungan pengendalian yang kurang. Setiap manusia memiliki berbagai keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi dengan kapasitas yang ada padanya, baik itu kebutuhan mendasar sampai kepada kebutuhan sekundernya, sehingga naluri kemanusiannya dapat mendorong ia untuk melakukan tindakan yang tidak etis guna memenuhi kebutuhannya. Berbagai kasus dan penyimpangan korporasi dan organisasi yang dilakukan oleh pegawai maupun pejabat adalah salah satu contoh kegagalan membangun nilai integritas dan nilai etika dalam berorganisasi sehingga dari hasil penelitian variabel lingkungan pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud* di pemerintah Kota Palu.

Hal ini sejalan dengan penelitian Fawzi (2011) menyatakan bahwa keefektifan

pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Pimpinan instansi wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya akan tetapi jika lingkungan pengendalian tidak tercipta dan terpelihara dengan baik maka tidak akan menimbulkan perilaku yang positif sehingga *Fraud* tidak dapat dicegah, sehingga dari hasil penelitian lingkungan pengendalian pemerintah Kota Palu tidak berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*.

Pengaruh Penilaian Risiko terhadap pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Palu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa penilaian risiko berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud*. Semakin baik penilaian risiko dalam SKPD maka akan semakin baik pula pencegahan *Fraud*.

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Arens (2008) bahwa penaksiran risiko dibutuhkan oleh manajemen sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian struktur pengendalian intern untuk meminimalkan salah saji dan ketidakberesan. risiko adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendeteksi atau mengevaluasi kemungkinan adanya kesalahan atau penurunan kualitas akibat beroperasinya suatu kegiatan. Penilaian risiko sangat penting karena dengan adanya penilaian risiko kita dapat mengetahui hal apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya *Fraud* sehingga dapat dicegah.

Pengaruh kegiatan pengendalian terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Palu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kegiatan

pengendalian tidak berpengaruh terhadap pencegahan *Fraud*. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwitasari (2013), walaupun pengendalian intern merupakan pihak yang memiliki kewajiban yang paling besar dalam masalah pencegahan, namun pengendalian intern tidak bertanggung jawab atas terjadinya kecurangan.

Pengaruh Informasi dan komunikasi terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Palu

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap Pencegahan *Fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian Fawzi (2011) menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan. Informasi dan komunikasi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah. Informasi dan komunikasi yang efektif memungkinkan pimpinan untuk mengelola keuangan negara dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Akan tetapi jika informasi dan komunikasi kurang efektif maka pengelolaan keuangan tidak akan transparan dan kecenderungan kecurangan akan terjadi.

Pengaruh pemantauan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Palu

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa pemantauan berpengaruh positif terhadap pencegahan *Fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) yang menemukan bahwa semakin baik dan semakin efektif suatu pengendalian internal maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *Fraud* disektor pemerintahan. Pemantauan pengendalian intern pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu

dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Apabila hal ini dilaksanakan dengan baik maka *Fraud* pada pemerintah Kota Palu akan semakin mudah dicegah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian serta pengujian hipotesis dengan Judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud* pada pemerintah Kota Palu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal pemerintah secara bersama-sama dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Palu.
2. Lingkungan pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud* pada pemerintah Kota Palu.
3. Penilaian risiko berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud* pada pemerintah Kota Palu.
4. Kegiatan Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud* pada pemerintah Kota Palu.
5. Informasi dan komunikasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud* pada pemerintah Kota Palu.
6. pemantauan berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *Fraud* pada pemerintah Kota Palu.

Rekomendasi

Beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan penggunaan SPIP guna untuk melakukan pencegahan *Fraud* pada Pemerintah Kota Palu oleh karena itu disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah lebih meningkatkan lagi sosialisasi mengenai SPIP karena masih banyak pegawai yang belum memahami

bagaimana sistem kerja SPIP sehingga bisa diterapkan dalam aturan dan perilaku kerja pegawai sehingga berfungsi dalam mencegah kecurangan

2. Variabel Lingkungan Pengendalian dan kegiatan pengendalian diharapkan untuk lebih ditingkatkan lagi yaitu pada aturan-aturan yang ketat, wewenang dan tanggung jawab hendaknya diberikan kepada orang yang sesuai dan sumber daya manusia.
3. Diharapkan pemerintah Kota Palu lebih meningkatkan informasi dan komunikasi sehingga tercipta komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahan sehingga setiap masalah bisa terselesaikan dengan baik
4. Untuk penilaian risiko dan pemantauan hendaknya dipertahankan dan terus ditingkatkan menjadi lebih baik
5. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian tentang Sistem pengendalian internal pemerintah terhadap Pencegahan fraud dengan menggunakan variabel lainnya yang terkait sehingga menambah referensi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan mengidentifikasi faktor-faktor lain yang benar-benar berpengaruh terhadap pencegahan pemerintah Kota Palu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Andi Mattulada Amir, SE, M.Si. Ketua Tim Pembimbing dan Dr. Vita Yanti Fattah, SE., M.Si. Anggota Tim Pembimbing atas kesediaan waktunya dalam memberikan bantuan, saran, petunjuk dan arahan yang diberikan dari awal sampai dengan selesainya penelitian ini, dan penghargaan setinggi-tingginya Prof. Dr. Ridwan, S.E., M.Si., Ak., Dr. Sulaeman Miru, S.E., M.Si., dan Dr. Nina Yusnita, SE., M.Si., Ak, penguji yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam perbaikan dan penyempurnaan penulisan hasil penelitian ini.

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dan mendorong lahirnya karya ilmiah yang lebih baik dikemudian hari.

DAFTAR RUJUKAN

- Arens, Alvin A. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Jilid satu. Edisi Keduabelas. Jakarta: Erlangga.
- Comitte of sponsoring organizations of the treadway commission. 2013. Internal control – integrated framework. Diakses dari www.coso.org pada 18 Januari 2015.
- Fawzi, M. Glifandi Hari. 2011. Analisis Pengaruh keefektifan Pengendalian Internal, Presepsi kesesuaian kompensasi, Moralitas Manajemen terhadap kecendrungan kecurangna akuntansi. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Meliany, Lia dan Erna Hernawati. 2013. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*. Jurnal Vol.3 No.1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Purwitasari, A. 2013. *Pengaruh Pengendalian Intern dan komitmen organisasi dalam pencegahan Fraud pengadaan barang*. Jurnal.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP.
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Edisi ke 12. Bandung: CV. Alfabeta.
- Wilopo. 2006. *Analisis factor-faktor yang mempengaruhi kecendrungan akuntansi*, jurnal simposium nasional akuntansi IX.